

**PENGARUH GINI RATIO, BELANJA PEMERINTAH DAN INVESTASI  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI KABUPATEN SIDRAP**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar*

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**Oleh:**

**NURQALBI**  
90300115148

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NurQalbi  
NIM : 90300115148  
Tempat/Tgl. Lahir : Maroangin, 12 Mei 1997  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Perumahan Bumi Aroepala Blok B 17  
Judul : Pengaruh Gini Ratio, Belanja Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, September 2019

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

M A K A S S A R

NurQalbi

NIM. 90300115148

ALA UDDIN

M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Ronangpolong – Gowa. ■ 424835, Fax 424836

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *"Pengaruh Gini Ratio, Belanja Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidrap"*, yang disusun oleh **NURQALBI, NIM 90300115148**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2019 bertepatan dengan 16 Rabi'ul-Awal 1441 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 13 November 2019

16 Rabi'ul-Awal 1441 H

#### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE, M.St., Ak	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Abdul Wahab, SE, M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. Alim Syahriati, SE, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Syaharuddin, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Andi Faisal Anwar, SE, M.Si	(.....)

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19661130 199303 1 003

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt, karena rahmat, keinginan dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tak lupa penyusun curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad swa yang telah membawa umatnya dari alam yang berliku-liku menuju jalan yang lurus yang aman dan sejahtera minadzulumati ilannur. Dengan izin dan kehendak Allah swt skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Skripsi ini berjudul ***“Pengaruh Gini Ratio, Belanja Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidrap ”*** telah diselesaikan dengan waktu yang direncanakan.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan adanya kerjasama, bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu: Ayahanda **Jumain** dan Ibunda **Hj. Marwah AS S.Pd.I** yang paling berjasa atas apa yang sampai saat ini saya capai, telah mendidik saya, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, menyekolahkan saya sampai pada tingkat ini dan terus memberikan doanya. Karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin

menyampaikan rasa terima kasih atas sumbangsih pemikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., PhD sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan para wakil Rektor serta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Hasbiullah SE., M.Si dan Dr. Alim Syahriati SE., M. Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas segala bantuan, kontribusi dan bimbingannya.
4. Bapak selaku Dr.Syahrudin,M.Si pembimbing I dan Bapak Andi Faisal Anwar SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Penguji skripsi Bapak Dr. H. Abdul Wahab SE.,M.Si dan Bapak Dr. Alim Syahriati, SE.,M.Si. yang telah mengajarkan kepada penyusun arti sebuah kesabaran, dan pelajaran bahwa calon sarjana harus mempunyai senjata untuk bersaing di dunia kerja.
6. Penguji Komprehensif yang telah mengajarkan saya arti kesabaran dan teladan, serta pelajaran bahwa calon sarjana harus mempunyai senjata untuk bersaing di dunia kerja Dr. Siradjuddin,SE.,M.SI., Dr. Hasbiullah,SE,M.Si dan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.

7. Seluruh staf bagian Akademik, tata usaha, jurusan dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penyusun mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan akademik dan administrasi.
8. Seluruh tenaga pengajar dan pendidik khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar yang telah memberikan ilmu dengan ikhlas kepada penyusun selama proses perkuliahan, dan praktikum.
9. Untuk saudaraku tercinta Syukran, Sri Rahayu Lestari, kak Muhramah Sulaeman, Nursyida Sulaeman, kak Imbran Rosadi, Muh Vikram dan kak Kon terima kasih atas semuanya, terima kasih atas dukungan dan motivasi dari kalian.
10. Teman-teman seangkatan 2015, terkhusus untuk jurusan Ilmu Ekonomi semoga tetap menjadi keluarga yang solid meskipun nantinya kita berpisah untuk mencapai kesuksesan masing-masing.
11. Terima kasih untuk Ernawati Razak, Hj. Asniar Kanna, Nur Iftitah dan Agus Priyono yang telah memberikan dukungan dan motivasi, terima kasih atas persahabatan yang luar biasa ini.
12. Teman seperjuangan menunggu di depan ruangan jurusan Asriani Yunus, Mifta, Dhya, Sisa, Andi Usnul, Citra, Reni, Dea, Sarina, Besse, Ammar, Anwar, dan teman-teman yang lainnya tetap semangat.
13. Terima Kasih untuk semangat dan dukungannya sahabat seposko KKN Karlos Halilintar Squad Kelurahan Manarang Kabupaten Pinrang.



14. Terima kasih juga buat Aidil Anwar yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi, menemani saya berjuang dan menyemangati saya hingga skripsi ini selesai dan hingga saya sampai pada tujuan saya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penyusun tak lupa mengharapkan saran dan kritik terhadap skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca. Amin.

Gowa, Juli 2019

Penulis,

**NurQalbi**

NIM : 90300115148



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Defenisi Operasional .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	13
A. Pertumbuhan Ekonomi .....	13
B. Gini Ratio .....	16
C. Belanja Pemerintah.....	21
D. Investasi .....	26
E. Hubungan Antar Variabel.....	29
F. Kerangka Pemikiran .....	31
G. Hipotesis .....	32



<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Sumber Data dan Lokasi Penelitian .....	33
C. Metode Pengumpulan Data .....	34
D. Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Sidrap.....	40
B. Perkembangan Gini Ratio, Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidrap .....	43
C. Hasil Penelitian.....	50
D. Pembahasan .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>



## DAFTAR TABEL

No.	Teks	halaman
1.1	Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Kabupaten Sidrap	2
1.2	Belanja Pemerintah Kabupaten Sidrap	4
1.3	Indeks Gini Ratio Kabupaten Sidrap	5
1.4	Penelitian Terrdahulu	9
4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Sidrap	43
4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidrap	44
4.3	Indeks Gini Ratio Kabupaten Sidrap	46
4.4	Belanja Pemerintah Kabupaten Sidrap	47
4.5	Investasi Kabupaten Sidrap	49
4.6	Uji Multikolinearitas	52
4.7	Uji Autokorelasi	53
4.8	Analisis Regresi Berganda	55
4.9	Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	56
4.10	Uji F Simultan	57
4.11	Uji t Parsial	58

## DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	halaman
2.1	Kerangka Pikir Penelitian	31
4.1	Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Sidrap	41
4.2	Grafik Normal P-Plot	51
4.3	Grafik Uji Heteroskedastisitas	54



## ABSTRAK

**N a m a : NURQALBI**  
**N I M : 90300115148**  
**Judul Skripsi : Pengaruh Gini Ratio, Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupten Sidrap**

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Gini Ratio, Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda melalui SPSS 21.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data *Time Series* tahunan periode 2006-2018 (13 tahun) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, Belanja Pemerintah dan Investasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gini Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap. Sedangkan secara bersama-sama variabel Gini Ratio, Belanja Pemerintah dan Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidrap.

**Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, Belanja Pemerintah, dan Investasi**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Setiap daerah tentunya mempunyai tujuan dalam pembangunan ekonomi termasuk di Kabupaten Sidrap. Kabupaten Sidrap merupakan salah satu kabupaten yang memiliki peranan penting dalam menyukseskan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi ini merupakan suatu usaha berkelanjutan yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten Sidrap untuk meningkatkan taraf hidup riil perkapita, yang merupakan cerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi selalu dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan merupakan suatu gambaran dari keberhasilan implementasi kebijakan makro ekonomi di suatu daerah yang dimana pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai atau sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Perkins di dalam Wardihan (2012) bahwa pemerintah di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai argument untuk memuliakan negara dan penguasa.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai dan terbentuk berbagai macam sektor ekonomi, yang dimana laju pertumbuhan suatu daerah dapat tercermin dari perubahan PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, berdasarkan indikator ini akan diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap dari tahun ketahun mengalami fluktuasi, yang tentunya dapat memberikan dampak negatif di berbagai sektor, kehidupan masyarakat dan terhadap perkonomian di Kabupaten Sidrap

**Tabel 1.1**  
**Data Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2012-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
2012	8,93
2013	6,93
2014	7,87
2015	8,03
2016	8,81
2017	7,11
2018	5,02

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap 2019*

Berdasarkan data yang di peroleh dari BPS (Badan Pusat Statsitik) Pada tabel di atas dapat dilihat selama periode 2012-2018 PDRB Kabupaten Sidrap menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap mengalami perlambatan atau mengalami penurunan yakni sekitar 7,11 persen dan 5,02 persen, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya yakni di tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sekitar 8,93 persen kemudian menurun lagi di tahun 2013 yakni sekitar 6,93 persen, dan di tahun 2014-2016 justru pertumbuhan ekonomi pada saat itu terus mengalami



peningkatan. Dengan demikian, peningkatan PDRB belum mampu berjalan dengan konsisten karena pertumbuhan ekonomi justru cenderung mengalami penurunan. Disisi lain penggunaan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi juga sangat penting untuk memaksimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah termasuk di Kabupaten Sidrap, faktor-faktor yang dimaksud di antaranya tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan kualitas penduduk, jumlah dan kualitas tenaga kerja serta ketersediaan barang-barang modal dan teknologi.

Di dalam teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Solow dan Swam, pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi penawaran. Menurut pendapat Solow dan Swam, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan dari faktor-faktor produksi antara lain, tingkat pertumbuhan modal, penduduk dan tingkat teknologi. Modal yang dimaksud tersebut adalah modal yang bersifat fisik seperti barang-barang modal dan investasi (Todaro & Smith 2006).

Di samping itu, belanja pemerintah juga memegang peranan penting di dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap, belanja pemerintah ini merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di daerah tersebut terutama dalam penyediaan barang dan jasa publik, ketersediaan dari barang jasa dan publik ini akan menentukan investasi (pengumpulan modal) baik masyarakat atau swasta. Dengan memaksimalkan biaya belanja pemerintah dengan bijak tentunya dapat menjadi motor penggerak proses pemulihan ekonomi dan bisa merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.

**Tabel 1.2**  
**Data belanja Pemerintah Kabupaten Sidrap Tahun 2012-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja pemerintah ( Milyar)</b>
2012	566,462,997,278.66
2013	738,651,821,492.00
2014	812,668,038,096.00
2015	1.044,498,205,909.92
2016	1.200,899,695,872.00
2017	1.298,748,117,451.00
2018	1.185,592,943,580.00

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap 2019*

Berdasarkan data yang di peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dari tabel di atas, adapun data belanja pemerintah Kabupaten Sidrap cenderung mengalami peningkatan hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dimana pada tahun 2012-2013 yaitu senilai 566.462 milyar dan 738.651 milyar rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2014 senilai 812.668 milyar rupiah dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya hingga pada tahun 2018 mencapai 1.185,59 milyar rupiah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama di dalam pembangunan namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup untuk menjadi jaminan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat akan meningkat secara merata. Di dalam pelaksanaanya, pembangunan ekonomi dihadapkan dengan berbagai macam masalah seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Masalah tersebut dapat menjadi suatu kendala di dalam pencapaian pertumbuhan

ekonomi oleh karenanya permasalahan-permasalahan tersebut harus mendapat perhatian dan diupayakan untuk ditiadakan. Ketimpangan pendapatan yang menjadi salah satu masalah di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sidrap dapat ditiadakan jika distribusi pendapatan dapat dilakukan secara merata.

Di Kabupaten Sidrap, belanja pemerintah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sidrap. Namun, disaat yang sama angka ketimpangan belum mengalami perbaikan yang berarti, yang ditandai dengan gini ratio yang berfluktuasi. Hal ini justru berbanding terbalik dengan tujuan-tujuan dan upaya pemerintah untuk menurunkan angka gini ratio dan kemiskinan, sehingga diduga pengeluaran pemerintah tersebut tidak efisien dan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan angka statistik sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Indeks Gini Ratio Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Ketimpangan (Gini Ratio)</b>
2012	0,391
2013	0,388
2014	0,369
2015	0,359
2016	0,384
2017	0,325
2018	0,340

*Sumber: BPS Kabupaten Sidrap, 2019*

Dari tabel di atas, dapat dilihat angka gini ratio Kabupaten Sidrap dari tahun 2012-2018 berfluktuasi, dimana pada tahun 2012 angka gini rasionya sekitar 0,391 namun ditahun 2017 sekitar 0,340. Keadaan atau kondisi ini, diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Sidrap, karena bisa saja menimbulkan terjadinya ketidakmerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, angka gini ratio tidak mampu ditekan secara konsisten untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di kabupaten Sidrap.

Selain belanja pemerintah dan gini ratio, salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap yaitu dengan upaya peningkatan investasi, investasi merupakan faktor yang penting di dalam pembangunan ekonomi dikarenakan investasi memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dimasa yang akan datang. Menurut Sukirno (2011), investasi adalah pengeluaran, penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal beserta perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia di dalam perekonomian.

Masalah dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap, bukan hanya bagaimana menumbuhkan perekonomian masyarakat tetapi juga dampak dari adanya pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan secara nyata oleh semua lapisan masyarakat. Karena biasanya sebagian besar hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut, hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja atau sebagian kecil

dari masyarakat elite dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin malah semakin bertambah miskin.

Dari data gini ratio, belanja pemerintah dan investasi yang cenderung mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap yang justru berfluktuasi dan cenderung menurun, hal ini tentunya akan berakibat pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap secara keseluruhan dan akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidrap. Berdasarkan yang di kemukakan diatas tersebut, penulis mencoba untuk membahas masalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap dengan mengangkat judul **"Pengaruh Gini Ratio, Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidrap"**.

#### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian adalah:

1. Apakah Gini Ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap ?
2. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap ?
3. Apakah Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap ?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Gini Ratio terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.
3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi khasanah keilmuan pada bidang studi ilmu ekonomi.
2. Memberikan gambaran seberapa besar kontribusi gini ratio, belanja pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun pertimbangan untuk pemerintah Kabupaten Sidrap, untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.



### E. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
1	2	3	4
Puspitasari Windy Astuti (2018)	Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Investasi memiliki hasil yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada PMA juga memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin (2005) menyebutkan bahwa PMA dan PMDN tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode setelah otonomi.
Merry Anitasari, Ahmad Soleh (2015)	Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu	Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan	Namun, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Diah Utami (2007) menunjukkan bahwa baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, variabel

		ekonomi di Provinsi Bengkulu	pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Devi Retnosari (2006)	Analisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat	Ketimpangan distribusi pendapatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat	Namun, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari Agussalim (2016) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

### ***G. Defenisi Operasional***

Dalam penelitian ini, defenisi operasional dari variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Variabel Independen (X)**

##### **a) Gini Ratio (X1)**

Variabel gini ratio merupakan jumlah kesenjangan pendapatan yang ada di Kabupaten Sidrap. Data gini rasio ini diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap, yang dinyatakan dalam satuan angka gini ratio.

##### **b) Belanja Pemerintah (X2)**

Belanja pemerintah yaitu realisasi dari pengeluaran atau belanja pemerintah untuk melakukan suatu pembangunan daerah, baik belanja langsung dan belanja tidak langsung ataupun belanja lainnya. Pengeluaran pemerintah ini juga adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut untuk belanja barang dan jasa. Data belanja pemerintah diperoleh dari BPS Kabupaten Sidrap dalam satuan Rupiah.

##### **c) Investasi (X3)**

Investasi adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bersumber dari kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Data investasi di peroleh dari BPS Kabupaten Sidrap yang dinyatakan dalam satuan Rupiah.

## 2. Variabel Dependen (Y)

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output dalam jangka panjang yang diukur dengan memperhatikan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun. Data pertumbuhan ekonomi ini diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap, yang dinyatakan dalam satuan Persen.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### *A. Pertumbuhan Ekonomi*

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan suatu perekonomian di dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Pendapatan masyarakat didapatkan melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur menggunakan data PDB (Sukirno, 2006)

Salah satu sasaran dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dalam harga konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto memperlihatkan proses kenaikan output jangka panjang. Penekanan pada proses, karena mengandung unsur dinamis, perubahan ataupun perkembangan. Oleh karena itu indikator pertumbuhan ekonomi tersebut biasanya akan dilihat dalam kurun waktu

tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut sangat relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebiakan ekonomi yang telah diterapkan pemerintah untuk mendorong efektivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektivitasnya.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap sektor dari tahun ke tahun. Konsep yang digunakan untuk menghitung PDRB adalah sebagai berikut:

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Keterangan :

G = Laju pertumbuhan Ekonomi

$pdrb_1$  = Pdrb suatu tahun

$Pdrb_0$  = Pdrb tahun sebelumnya

Pandangan Neoklasik oleh Solow dan Swam mengatakan bahwa pertumbuhan didukung oleh akumulasi modal "*Diminishing rate*" dalam jangka panjang. Konsekuensinya, negara akan mencapai "*Steady-state*"nya dalam jangka panjang, yaitu stagnasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu implikasi dari model pertumbuhan ini yaitu bahwa negara-negara terbelakang dengan ekonomi terbuka, pada akhirnya dapat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju disebabkan modal mengalir dari negara maju ke negara terbelakang sehingga



dapat menawarkan keuntungan yang lebih tinggi atas investasi, yang mengakibatkan konvergensi ekonomi (Todaro dan Smith 2006).

Di sisi lain, teori yang dikemukakan dalam teori ekonomi neoklasik bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Theodore W. Schultz (1961), dimana dalam teorinya tersebut Schultz menekankan bahwa manusia adalah suatu modal layaknya bentuk modal lainnya seperti mesin dan teknologi. Selain menekankan tentang hal tersebut, Schultz juga menegaskan bahwa pendidikan, pengetahuan, kesehatan serta keterampilan merupakan bentuk dari modal manusia. Terbentuknya investasi dalam modal sosial juga mendatangkan imbalan (penghasilan), dimasa mendatang seperti investasi dalam modal fisik.

Adapun pandangan neoklasik dan teori oleh W. Schultz tersebut, sejalan dengan Teori Pertumbuhan Baru (*new growth theory*) menyatakan bahwa negara tidak selalu mengalami “Steady-state” dalam jangka panjang. Misalnya, teori oleh Lucas (1988) dan Romer (1986) yang menganggap bahwa sumber daya manusia sebagai variabel endogen pertumbuhan ekonomi tidak ada “*Diminishing return*” pada kombinasi dari akumulasi sumber daya manusia dan barang modal. Dengan kata lain, ada pertumbuhan dalam jangka panjang. Hasil “*Constant returns to scale*” ini disebabkan oleh efek eksternalitas positif pengetahuan, yang mempengaruhi output dari masing-masing perusahaan dalam perekonomian. Teori lain juga yang dikemukakan adalah, mendesak pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Dia berpendapat bahwa terdapat “*Spillovers*” modal yang dibuat oleh perusahaan, yang dimana pada gilirannya menciptakan pengetahuan, pengetahuan memicu eksternalitas positif dan akan mencegah penyusutan pertumbuhan dalam jangka panjang

## **B. Gini Ratio**

Ketimpangan didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan pendapatan yang diterima setiap individu atau rumah tangga dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh tingkat produktivitasnya. Masalah ketimpangan pendapatan terjadi jika suatu negara mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketimpangan pendapatan yang terjadi menunjukkan bahwa pendapatan rendah dinikmati oleh hanya sebagian besar penduduk dan sebaliknya pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Artinya perbedaan jumlah pendapatan yang lebih besar antar lapisan dalam masyarakat hanya dapat dirasakan oleh golongan tertentu saja.

Todaro dan Smith (2006) menyatakan ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan beberapa hal diantaranya:

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi.
2. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas.
3. Ketimpangan pendapatan umumnya dianggap tidak adil.

Ketimpangan pendapatan dapat diukur melalui Indeks Gini atau Gini Ratio. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu, nilai indeks gini nol (0) artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan yang nilainya satu (1) artinya ketimpangan sempurna.

Menurut Todaro dan Smith (2006), ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi ketimpangan rendah, ketimpangan sedang dan tinggi. Ukuran ini sesuai dengan ukuran ketimpangan yang di gunakan, nilai indeks gini pada negara-negara yang tingkat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0.50 hingga 0.70, untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata nilainya antara 0.20 hingga 0.35 sedangkan nilai indeks gini sekitar 0.4 termasuk tingkat distribusi pendapatan yang relatif timpang.

Adapun ketimpangan pendapatan dalam islam, menurut pandangan Quraish Shihab (2002), prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan adalah keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini, mengantar kepada pencegahan terjadinya segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau sekelompok. Atas dasar ini pula Al-Quran menolak dengan tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu. Hal ini tercermin pada surat Al-Taubah ayat 34-35 yang memberikan ancaman sedemikian keras kepada para penimbun.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنَزْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka:“ Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”

Kesenjangan pendapatan dan dan kekayaan alam yang ada di dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat dan komitmen islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan tersebut harusnya diatasi dengan yang ditekankan dalam islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini:

1. Menghapuskan monopoli kecuali yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada bidang-bidang tertentu.
2. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk tetap aktif di dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi.
3. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat.
4. Melaksanakan *social economic security insurance* atau *amanah at-tafakul al-ijtima'i* dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara-cara ini, standar kehidupan individu akan lebih terjamin karena di dalam konsep keadilan islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan yang sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan di dalam islam karena kontribusi oleh masing-masing orang terhadap masyarakat berbeda-beda.

Kuznet (1955), Kaldor (1960) menyampaikan gagasannya mengenai *inverted U curve* yaitu kondisi ketimpangan yang pada tahap awal pertumbuhan akan mengalami peningkatan lalu pada titik tertentu akan menurun. Perubahan struktur perekonomian juga terjadi ketika pertumbuhan ekonomi berjalan. Tahap awal pertumbuhan ekonomi didominasi dengan sektor pertanian lalu mengarah pada peningkatan peran sektor non pertanian seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Namun hal itu ditentang Karl Marx (1964) dimana beberapa inti dari pemikiran Karl Marx yaitu mengenai kehidupan dua pihak yang bertolak belakang dan berlawanan, Karl Marx menyebutnya sebagai golongan kapitalis dan golongan proletariat. Golongan kapitalis ini adalah sekelompok orang yang menguasai alat-alat produksi dan memiliki modal yang sangat banyak, baik modal dalam bentuk uang maupun surat-surat berharga. Sedangkan golongan proletariat (golongan yang tertindas) adalah kaum yang bekerja untuk kaum kapitalis dengan upah yang tidak sesuai dengan kinerjanya.

Menurut pernyataan Karl Marx, timbulnya keberadaan dari kedua golongan tersebut disebabkan terpusatnya kepemilikan alat-alat produksi ataupun faktor-faktor hanya disegelintir orang saja atau dikarenakan tidak meratanya jumlah kepemilikan faktor produksi. Oleh karena ketimpangan itulah yang juga menyebabkan tidak meratanya pendapatan yang diperoleh masing-masing individu disebabkan perbedaan kuantitas kepemilikan faktor produksi dan hal itu juga yang menyebabkan adanya si kaya dan si miskin.



Pandangan yang dikemukakan oleh Kuznet dan Karl Marx sejalan dengan Thomas Piketty (2014) yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan ketidaksetaraan ekonomi. Teorinya didasarkan pada formula ketidaksetaraan mendasar, yang dinyatakan dalam dua variabel  $r$  adalah pengembalian modal dan  $g$  adalah pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor mencerminkan kekuatan divergensi dan konvergensi dalam masyarakat. Konvergensi adalah suatu gerakan menuju pengurangan ketidaksetaraan yang diekspresikan dalam penyebaran pengetahuan dan perluasan investasi dalam sumber daya manusia. Divergensi sebaliknya mengarah pada konsentrasi modal ditangan segmen populasi yang paling makmur dan memperdalam ketimpangan sosial ekonomi.

Jadi, asalkan pengembalian modal melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi (rumus  $r > g$ ), ada peningkatan yang bertahap dalam ketidaksetaraan didalam masyarakat yang secara radikal merusak nilai-nilai meriokratis. Dalam suatu ekonomi yang ditandai dengan skala besar akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, modal dari waktu ke waktu mencapai proporsi yang tidak proporsional dan mengubah tidak hanya distribusi kekayaan dalam masyarakat, tetapi juga strukturnya. Hanya pemilik modal yang lebih kaya, tetapi bukan pekerja biasa.

Intinya adalah ketika tingkat pendapatan dari modal secara signifikan melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi, adalah logis bahwa kekayaan yang diwariskan tumbuh lebih cepat daripada produksi pendapatan. Pemilik warisan hanya perlu menyimpan warisan daripada pendapatan modal mereka untuk melihat bahwa modal tumbuh lebih cepat daripada ekonomi. Konsentrasi modal



akan mencapai tingkat ekstrim yang berpotensi tidak sesuai dengan nilai-nilai meriokratis dan prinsip keadilan sosial, yang merupakan dasar dari masyarakat demokratis modern.

### ***C. Belanja Pemerintah/Pengeluaran Pemerintah***

Belanja pemerintah dapat didefinisikan sebagai alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah, setiap tahunnya ke berbagai sektor ataupun berbagai bidang yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat atau masyarakat melalui berbagai macam program.

Mangoesoebroto (1997) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan pemerintah. Apabila pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### **1. Komponen Belanja Pemerintah**

Ada beberapa komponen belanja/pengeluaran pemerintah diantaranya sebagai berikut:

##### **a. Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah belanja pemerintah yang di anggarkan, yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah. Belanja pemerintah langsung terdiri dari:

1. Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk penganggaran honorium PNS dan non PNS termasuk narasumber dan tenaga ahli di luar instansi.
2. Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja barang atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program, kegiatan antara lain penggunaan barang habis pakai, pengadaan barang, inventaris kantor, belanja perjalanan dinas serta penyelenggaraan rapat.
3. Belanja lainnya yang termasuk dalam belanja langsung yaitu belanja modal yang digunakan untuk pembelanjaan, untuk meningkatkan modal yang mana dapat menambah asset tetap bagi negara untuk mempertahankan inventaris atau infrastruktur yang dimiliki oleh suatu negara sehingga dapat memberikan manfaat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas negara tersebut.
4. Belanja pendidikan yaitu belanja yang digunakan dalam rangka meningkatkan pendidikan.
5. Belanja kesehatan yaitu belanja yang digunakan untuk peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.
6. Belanja pembangunan yaitu belanja yang dipergunakan untuk peningkatan pembangunan.
7. Pengeluaran yang dianggarkan untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup.

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja pemerintah yang dimana merupakan pembelanjaan secara tidak langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja tidak langsung terdiri dari:

1. Belanja pegawai, pengeluaran yang digunakan untuk membiayai gaji pokok, tunjangan-tunjangan lainnya beserta tambahan penghasilan PNS berupa pemberian uang makan.
2. Belanja hibah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang dipergunakan untuk pemberian hibah pemerintah daerah kepada organisasi masyarakat atau perorangan yang terdiri dari pemberian hibah kepada lembaga olahraga, lembaga pendidikan, KPI, panwaslu dalam rangka pemilu Pilpres dan Pileg.
3. Belanja bantuan sosial yaitu belanja yang dianggarkan untuk organisasi masyarakat/perorangan yang terdiri dari pemberian bantuan kepada organisasi masyarakat, keagamaan, bantuan partai politik dan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
4. Belanja bagi hasil adalah belanja yang terdiri dari belanja bagi hasil PBB, kepada pemerintah kelurahan dan belanja bagi hasil PAD kepada pemerintah kelurahan.
5. Belanja keuangan merupakan pengeluaran untuk pemberian bantuan keuangan dari pemerintah

Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesebroto (2008), Giavazzi dan Vegano (1996), mengemukakan teorinya yang didasarkan kepada pandangan masyarakat bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut. Masyarakat mempunyai suatu toleransi pajak, yakni suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah sangat membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. *Fiscal Dominance* (FD) dapat meningkatkan pertumbuhan fiskal yang didorong oleh pengurangan fiskal yang mendorongnya memiliki efek ekonomi yang ekspansif.

Inti dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dalam pengeluaran pemerintah.

Pendapat yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman ditentang oleh Bird dalam Mangkoesebroto (2008) yang mengatakan bahwa, selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke aktivitas yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Dalam hal ini tentunya, menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah dalam persentasenya terhadap PDB. Akan tetapi, setelah terjadinya gangguan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB perlahan-lahan akan menurun kembali

pada tingkat sebelum terjadinya gangguan. Jadi menurut Bird, efek pengalihan hanya gejala dalam jangka pendek dan tidak terjadi dalam jangka panjang.

Adapun pendapat yang kemukakan oleh Peacock & Wiseman dan Bird senada dengan yang dikemukakan oleh Keynes dalam Dumas (1996), dimana persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah  $Y = C + I + G$ . Dimana, C = Konsumsi, G = Pengeluaran pemerintah dan I = Investasi. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian. Dengan ini, dapat dianalisis seberapa besar peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

Perpajakan dan pengeluaran pemerintah tersebut saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi dengan efek pengganda dari pajak dan pemotongan pajak, merupakan kebijakan yang dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah tersebut.



Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak tersebut dari aliran sirkulasi pendapatan nasional, akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda akan memberikan penurunan tekanan pada inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan, akan tetapi sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak, maka suatu suntikan kedalam aliran sirkulasi pendapatan nasional ini akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

### ***C. Investasi***

Investasi merupakan salah satu faktor utama dan sangat penting dalam pembangunan ekonomi yang telah diakui oleh para ahli ekonomi. Bahkan di katakan bahwa tak ada pembangunan tanpa investasi. Tujuan utama dilakukannya kegiatan investasi oleh para investor atau perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang.

Teori ekonomi dalam mendefinisikan investasi yaitu sebagai pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan utamanya untuk menambah barang-barang modal di dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan kata lain, investasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian.



Investasi berdasarkan dari jenisnya terbagi menjadi dua, diantaranya: Pertama investasi pemerintah yaitu investasi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, investasi yang dilakukan oleh pemerintah ini umumnya tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan; yang kedua yaitu investasi swasta, investasi ini dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi yang dilakukan oleh swasta asing, yang dimana disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Selain itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tingkat investasi yaitu :

1. Pengaruh Tingkat Suku Bunga
2. Pengaruh Tingkat Inflasi
3. Tingkat Pendapatan Nasional
4. Pengaruh Infrastruktur
5. Keuntungan Yang Akan Diperoleh

Investasi menurut teori klasik dalam Nopirin (1988), investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Dimana semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya dan penggunaan dana semakin kecil.

Adam Smith dalam Jhingan (2003), investasi dilakukan dikarenakan para pemilik modal mengharapkan keuntungan dan harapan masa depan, keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan teknologi. Pada waktu laju pemupukan modal meningkat, persaingan antar pemilik modal juga

akan meningkat. Upah akan dinaikkan sedangkan keuntungan yang diperoleh akan menurun.

Investasi juga merupakan sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja di dalam meningkatkan produksi. Kaum klasik menganggap akumulasi modal sebagai suatu syarat yang mutlak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan penanaman modal, maka dapat meningkatkan pendapatan.

Namun pendapat oleh teori Klasik tersebut ditentang oleh Keynes dalam Puspitasari Windy Astuti (2018) mengenai teori Marginal Efficiency of Capital, menurut Keynes tingkat bunga bukanlah satu-satunya yang menyebabkan naik turunnya investasi melainkan juga kemungkinan keuntungan yang diharapkan dari sejumlah investasi yang menurut Keynes disebut sebagai marginal efficiency of capital (MEC), disini yang dimaksud harapan keuntungan yaitu berapa besarnya persentase kemungkinan untung yang diperoleh dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku saat itu. Secara rasional keputusan untuk melakukan investasi kemungkinan terjadi, jika keuntungan yang diharapkan lebih besar dari tingkat bunga, maka investasi dilaksanakan. Dengan demikian, investasi akan naik dan menjadi lebih besar. Tetapi jika keuntungan yang di harapkan lebih kecil dari tingkat bunga, maka investasi tersebut tidak dilaksanakan. Ini dapat menyebabkan investasi turun atau semakin rendah. Jika keuntungan yang diharapkan sama dengan tingkat bunga, maka investasi ini bisa dilaksanakan bisa juga tidak.

Berdasarkan pendapat Keynes dalam Putong (2002), dapat diketahui bahwa fungsi investasi Keynes berslope negatif, artinya semakin rendah tingkat bunga maka investasi semakin besar. Tetapi mengingat sekecil apapun suku bunga, bila investasi yang dilakukan tersebut mendatangkan keuntungan yang lebih kecil, maka investasi tetap saja rendah atau terbatas.

Pandangan teori klasik dan Keynes mengenai investasi senada dengan teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar dalam Sadono (2007) dimana pendapatnya ini merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar ini, memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif masyarakat. Dimana apabila nantinya akan dilakukan suatu pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar.

#### ***D. Hubungan Antar Variabel***

##### **1. Hubungan gini ratio terhadap pertumbuhan ekonomi**

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets dalam Kuncoro (2006) seorang ekonom klasik menyatakan, pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan

ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun apabila negara-negara miskin tersebut sudah maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan menurun (*an inverse U shaped patern*).

Beberapa ekonom pembangunan juga tetap berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznets tidak dapat dihindari, pendapat Kuznets ini dapat dibuktikan dengan penelitian Yamamura dalam Ilham (2010) bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebaliknya ada beberapa penelitian yang lain, mengungkapkan terdapat hubungan yang negatif antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi.

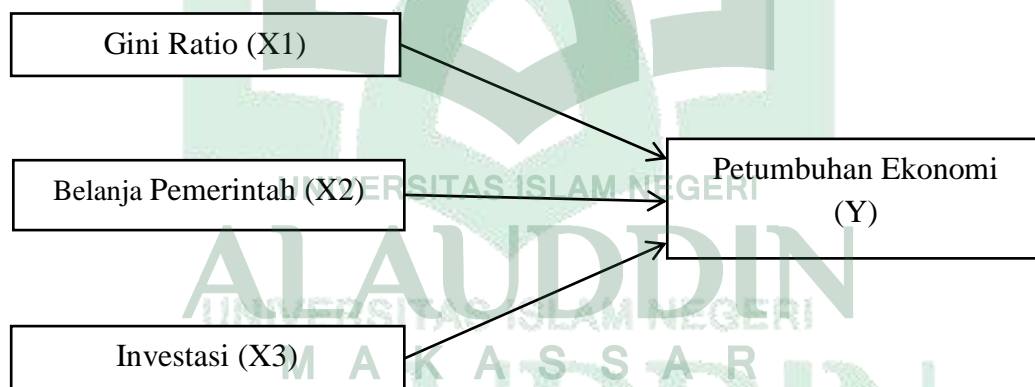
## **2. Hubungan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan dari pendapatan nasional dari tahun ke tahun, sementara belanja pemerintah itu sendiri merupakan bagian dari pendapatan nasional. Belanja pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian, tujuan kebijakan fiskal ini sendiri adalah menstabilkan harga dan memacu pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dikembangkan dalam Keynesian Cross, dimana dikatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah berdampak positif pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output (Mankiw, 2003). Belanja pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan akan barang dan jasa secara agregat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

### 3. Hubungan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah dengan adanya investasi berupa pembelian barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian, sehingga PDB riil dapat mengalami peningkatan dan dengan demikian akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Tri Handayani, 2011). Peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi yang akhirnya akan berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, dan pada tahap selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Adrian Sutawijaya, 2010).

#### F. Kerangka Pikir



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

### ***G. Hipotesis***

Untuk dapat mengarahkan hasil dari suatu penelitian, maka disampaikan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang bersifat sementara. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga bahwa gini ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.
2. Diduga bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.
3. Diduga bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***F. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan *kuantitatif*, yaitu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menguji data yang berupa angka-angka (*numeric*) yang kemudian dianalisis dan diolah menggunakan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau hubungan antara variabel. Pendekatan ini berangkat dari data kemudian di proses menjadi informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan.

##### ***G. Sumber Data dan Lokasi Penelitian***

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data pertumbuhan ekonomi, gini ratio, belanja pemerintah dan investasi yang diperoleh atau di catat dari laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap dalam kurung waktu 13 tahun terakhir (2006-2018), dan sumber lainnya seperti dokumen, instansi-instansi terkait, dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Sidrap melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Sidrap dikarenakan, dari data gini ratio, belanja pemerintah dan investasi yang cenderung mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap yang justru berfluktuasi dan

cenderung menurun, hal ini tentunya akan berakibat pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap secara keseluruhan dan akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabuapten Sidrap.

#### ***H. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data adalah suatu usaha yang pada dasarnya untuk mengumpulkan data dengan prosedur standar. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau studi pustaka, sehingga tidak diperlukan teknik sampling atau kuisioner.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data berupa *Time Series*. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapatkan dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi, data laporan yang telah tersedia.

#### ***I. Metode Analisis Data***

Penelitian ini menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi. Di dalam metode ini alat analisis yang biasa digunakan dalam khasanah penelitian adalah analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung pada variabel yang lain yang disebut dengan variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari variabel yang diketahui.

## 1. Analisis Regresi Berganda

Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian adalah model analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh gini ratio, belanja pemerintah, investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap yang dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut:

$$Y = a + X_1 \beta_1 + X_2 \beta_2 + X_3 \beta_3 + e$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

A = Konstanta

X<sub>1</sub> = Gini Ratio

X<sub>2</sub> = Belanja Pemerintah

X<sub>3</sub> = Investasi

e = Terms of error

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) maka teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik pada umumnya mencakup Uji Normalitas, Uji Multikolineritas,

Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Berikut penjelasan masing-masing Uji Asumsi Klasik yaitu:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Adapun metode yang dipakai untuk uji normalitas diantaranya adalah analisis grafik dan analisis statistik.

Uji normalitas di dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik. Uji normalitas dapat deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya.

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Nilai korelasi dapat dilihat pada *collinearity statistic*. Apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) memperlihatkan hasil yang lebih besar dari 10 dan nilai tolerance tidak boleh lebih kecil dari 0,1 maka menunjukkan adanya gejala multikolinieritas

sedangkan apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 maka tidak ada gejala multikolinearitas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan Variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam penelitian ini yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis grafik *Scatter Plot* dengan ketentuan:

- a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik- titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada pola Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak untuk dipakai.

### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linear terdapat adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Salah satu metode analisis yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan pengujian Durbin Watson (DW test).

### 3. Pengujian Hipotesis

#### 1) Analisis Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) yang kecil atau nilainya mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variabel-variabel dependen (terikat) terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati nilai satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Akan tetapi adakalanya dalam penggunaan koefisien regresi terjadi bisa saja terhadap satu variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen akan menyebabkan peningkatan  $R^2$ , tidak peduli apakah variabel tersebut memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (memiliki nilai  $t$  yang signifikan).

#### 2) Uji F Statistika

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel –variabel independen (bebas) secara keseluruhan signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen (terikat). Dimana apabila nilai  $f_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $f_{tabel}$  maka variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

- a.  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila  $f_{hitung} < f_{tabel}$ , artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan



- b.  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika  $f_{hitung} > f_{tabel}$ , artinya variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

### 3) Uji T statistika

Uji t statistika ini bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Uji t statistik ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen (bebas) secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).

Tingkat signifikansi 5% dengan pengujian yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, yang artinya salah satu variabel independen (bebas) mempengaruhi variabel dependen (terikat) secara signifikan
- b. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  di terima, yang artinya salah satu variabel independen (bebas) tidak mempengaruhi variabel dependen (terikat).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *J. Gambaran Umum Kabupaten Sidrap*

##### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dengan jarak  $\pm 138$  km di sebelah utara kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara Astronomis Kabupaten Sidrap terletak diantara  $3^{\circ}43'-4^{\circ}09'$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}41'-120^{\circ}10'$  Bujur Timur. Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografi berada di tengah-tengah Propinsi Sulawesi Selatan, yang secara otomatis menjadikan Kabupaten Sidrap berada pada posisi yang sangat strategis. Secara administratif Kabupaten Sidrap berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang.

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo.

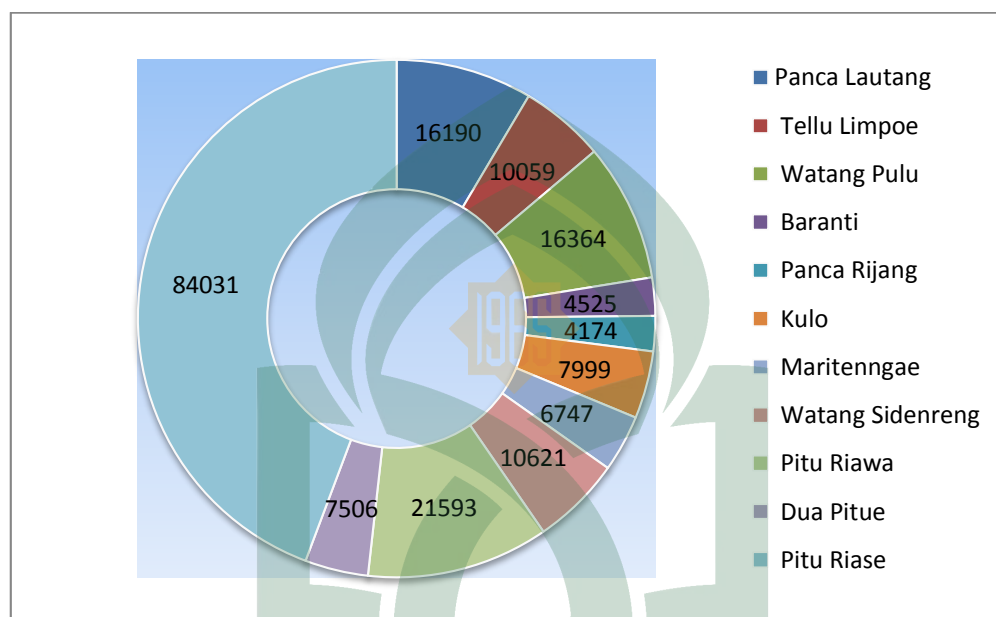
Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng.

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare.

##### **2. Luas Wilayah**

Wilayah Kabupaten Sidrap terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan (68 Kelurahan dan 38 Desa) dengan luas 189.808,70 Km<sup>2</sup>. Adapun Kecamatan Pitu Riase merupakan kecamatan terluas dengan luas 84.031,41 Km<sup>2</sup>. Jumlah sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Sidrap sebanyak 38 aliran sungai dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Watang

Pulu dan Kecamatan Dua Pitue, yakni 8 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 3 sungai yaitu Sungai Bilokka dengan panjang 20.000 meter, disusul Sungai Bila dengan panjang sekitar 15.100 meter dan Sungai Rapping dengan panjang sekitar 15.000 meter.



Gambar 4.1 Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Sidrap

### 3. Topografi

Kabupaten Sidrap berada di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota kabupaten berada di Pangkajene. Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidrap bervariasi dengan dataran tertinggi adalah kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah di Kecamatan Maritenngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 MDPL. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Sidrap yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah

bergunung, kemudian berbukit dan yang terakhir adalah rawa danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritenngae, dan Dua Pitue kondisi Topografi 100 persen tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung.

#### **4. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk merupakan suatu indikator dan komponen penting di dalam kegiatan perekonomian. Penduduk merupakan aset pembangunan yang dapat diberdayakan secara optimal. Tetapi disisi lain jumlah penduduk dapat menjadi beban di dalam pembangunan apabila pemberdayaannya tidak diiringi dengan kualitas jumlah penduduk yang memadai pada wilayah atau daerah yang bersangkutan. Penduduk adalah seluruh individu yang berdomisili di suatu wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan menetap.

Berdasarkan tabel data jumlah penduduk Kabupaten Sidrap tahun 2006 sampai dengan tahun 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Sidrap setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana pada tahun 2006, jumlah penduduk di Kabupaten Sidrap yaitu mencapai angka 246.879 jiwa kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan dan hingga tahun 2018 mencapai angka 299.123 jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sidrap Tahun 2006-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>
2006	246.879
2007	248.769
2008	250.666
2009	252.483
2010	271.911
2011	274.652
2012	277.413
2013	281.784
2014	285.419
2015	289.101
2016	292.830
2017	296.608
2018	299.123

*Sumber: BPS Kabupaten Sidrap, 2019*

**B. Perkembangan Gini Ratio, Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap  
 Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidrap**

**1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidrap**

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang sangat penting di dalam penilaian kinerja suatu perekonomian. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan atau memperoleh tambahan pendapatan ataupun kesejahteraan masyarakat pada

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang terus-menerus menunjukkan peningkatan, maka hal tersebut menggambarkan bahwa perekonomian di daerah itu berkembang dengan sangat baik. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang kecil dan mengalami peningkatan setiap tahunnya belum tentu dapat dikatakan berhasil di dalam membangun perekonomiannya.

**Tabel 4.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidrap Tahun 2006-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
2006	6,96
2007	5,46
2008	8,23
2009	6,65
2010	4,45
2011	11,82
2012	8,37
2013	6,93
2014	7,87
2015	8,03
2016	8,81
2017	7,11
2018	5,02

*Sumber: BPS Kabupaten Sidrap, 2019*

Di dalam pembahasan ini dapat dilihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018, data yang digunakan untuk dapat melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah data PDRB (produk domestik regional bruto) atas dasar harga konstan. Perkembangan



pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap tahun 2006-2018, secara umum laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2006 laju pertumbuhan ekonominya yaitu 6,96 persen dan di tahun 2007 yaitu 5,46 persen, hingga di tahun-tahun berikutnya yaitu 2017 sampai dengan 2018 juga menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan yaitu 7,11 persen di tahun turun menjadi 5,02 persen di tahun 2018.

## **2. Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Sidrap**

Kebijakan pemerintah di dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin dari ketimpangan pendapatan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Ketimpangan pendapatan merupakan cerminan terjadinya ketimpangan di dalam hal pendistribusian pendapatan pada kelompok-kelompok masyarakat di suatu negara atau wilayah. Ketimpangan pendapatan merupakan pendistribusian yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total di antara berbagai rumah tangga di dalam negara (Todaro 2013). Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari indeks gini, indeks gini merupakan suatu ukuran numerik agregat ketimpangan pendapatan yang berkisa dari 0 yang artinya pemerataan sempurna sampai dengan 1 yang artinya ketimpangan sempurna.

Secara umum kondisi ketimpangan pendapan di Kabupaten Sidrap berdasarkan dari angka gini ratio pada tabel indeks gini, dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2006, angka ketimpagan di Kabupaten Sidrap sebesar 0,347 persen

dan 0,385 persen di tahun 2007, hingga di tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2017, angka gini ratio di Kabupaten Sidrap sebesar 0,325 kemudian di tahun 2018, angka ketimpangan di Kabupaten Sidrap mencapai 0.340 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan indeks gini di Kabupaten Sidrap menunjukkan trend yang meningkat.

**Tabel 4.3**  
**Data Indeks Gini Ratio Kabupaten Sidrap Tahun 2006-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Gini</b>
2006	0,347
2007	0,385
2008	0,351
2009	0,390
2010	0,304
2011	0,338
2012	0,391
2013	0,388
2014	0,369
2015	0,359
2016	0,384
2017	0,325
2018	0,340

*Sumber: BPS Kabupaten Sidrap, 2019*

### 3. Perkembangan Belanja Pemerintah di Kabupaten Sidrap

Belanja pemerintah daerah adalah salah satu bentuk dari pembiayaan suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau realisasi biaya yang digunakan untuk membangun daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan adanya pengeluaran pemerintah ini, dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mendorong perubahan struktur sosial budaya dan perekonomian menuju kehidupan yang lebih baik.

**Tabel 4.4**  
**Data Belanja Pemerintah Di Kabupaten Sidrap Tahun 2006-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja Pemerintah</b>
2006	331,194,069,864.00
2007	404,471,387,820.00
2008	508,130,280,222.45
2009	523,645,591,040.11
2010	492,946,189,824.35
2011	595,591,702,664.00
2012	566,462,997,278.66
2013	738,651,821,492.00
2014	812,668,038,096.00
2015	1,044,498,205,909.92
2016	1,200,899,695,872.00
2017	1,298,748,117,451.00
2018	1,185,592,943,580.00

*Sumber: BPS Kabupaten Sidrap, 2019*

Belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah di dalam penentuan anggarannya, belanja pemerintah terus mengalami perkembangan seiring dengan peningkatan aktivitas pemerintah di dalam perekonomian tersebut, diantaranya disebabkan karena adanya perubahan-perubahan dalam perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi serta perubahan oleh kegiatan sektor swasta. Pemerintah harus memainkan perannya di dalam mengatur penggunaan sumber-sumber daya, distribusi pendapatan oleh konsumen sehingga dapat mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Belanja pemerintah sangat berperan penting Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga sejalan dengan perkembangan laju penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah di Kabupaten Sidrap yang kemudian akan menopang sistem perekonomian daerah. Secara umum, realisasi belanja pemerintah di Kabupaten Sidrap berdasarkan data belanja pemerintah Kabupaten Sidrap menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana pada tahun 2006 belanja pemerintah di Kabupaten Sidrap sebesar Rp 331.194.069.864 milyar. Hingga pada tahun-tahun berikutnya belanja pemerintah di Kabupaten Sidrap terus mengalami peningkatan secara perlahan dimana pada tahun 2018 belanja pemerintah ada dikisaran RP 1.185.592.943.580.00 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan belanja pemerintah di Kabupaten Sidrap terus mengalami peningkatan.

#### **4. Perkembangan Investasi di Kabupaten Sidrap**

Investasi merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Pertambahan

barang modal tersebut memungkinkan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa mendatang di dalam perekonomian. Investasi sebagai salah satu komponen pembentuk PDRB, investasi menempati posisi yang sangat penting di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak dengan adanya investasi dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, utamanya masyarakat yang sedang dalam tahap mencari kerja, untuk itulah investasi sangat dibutuhkan untuk peningkatan perekonomian suatu negara maupun daerah.

**Tabel 4.5**  
**Data Investasi di Kabupaten Sidrap Tahun 2006-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Investasi</b>
2006	712,044.32
2007	791,825.90
2008	984,915.17
2009	1,110,638.44
2010	1,607,738.47
2011	1,912,624.26
2012	2,284,616.33
2013	2,763,197.84
2014	3,089,131.36
2015	3,492,443.80
2016	4,023,356.26
2017	4,530,141.11
2018	5,016,222.98

*Sumber: BPS Kabupaten Sidrap, 2019*

Secara umum, berdasarkan dari data investasi di Kabupaten Sidrap terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2006 investasi di Kabupaten Sidrap sebesar Rp 712.044.32. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya perkembangan investasi terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2018 perkembangan investasi mencapai angka Rp 5.016.222.98.

### ***C. Hasil Penelitian***

#### **1. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan uji statistik untuk mengukur sejauh mana sebuah model regresi dapat dikatakan sebagai model regresi yang baik. Model regresi dikatakan baik apabila model regresi tersebut telah memenuhi asumsi-asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Proses pengujian asumsi klasik menggunakan SPSS dilakukan secara bersama-sama dengan proses uji regresi sehingga menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji regresi.

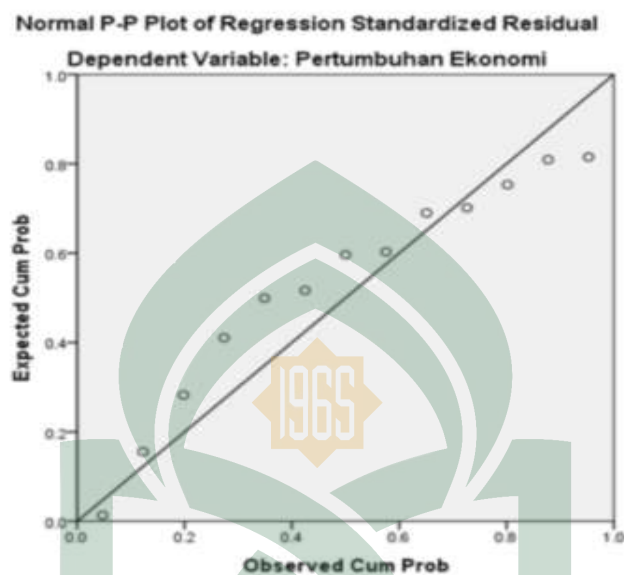
##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas sebuah data adalah dengan menggunakan metode analisis grafik. Baik dengan melihat grafik secara histogram maupun dengan melihat secara *Normal Probability Plot*. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran dua (titik) pada sumbu diagonal



pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari residualnya sebagaimana yang terlihat pada gambar

**Gambar 4.2**  
**Grafik Normal P-Plot**



*Sumber: Output SPSS 21 2019*

Dari hasil *normal probability plot* diatas menunjukkan bahwa data menyebar di atas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal serta menunjukkan pola distribusi mendekati normal maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara *variable independent*. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantar variabel bebas. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF

yang tinggi (karena  $VIF=1/Tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolineritas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umumnya digunakan adalah *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 5.

**Tabel 4.6**  
**Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Gini Ratio	.761	1.314
Belanja Pemerintah	.658	1.520
Investasi	.839	1.192

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Olah SPSS 21, 2019

Berdasarkan pada aturan *Variance inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*, maka apabila VIF melebihi angka 5 maka terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 5 atau *tolerance* lebih dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan output hasil Uji multikolinearitas pada tabel 4.6 diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variable independen gini ratio (X1), belanja pemerintah (X2) dan investasi (X3), < 10,00 dan nilai *tolerance* > 0,10. maka dapat dinyatakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multi-kolinearitas.

**c. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu

korelasi antara residual satu pengamatan ke pengamatan lain pada model analisis regresi. Pengujian ini menggunakan Durbin Watson dan hasil uji autokorelasi untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel uji Durbin Watson, sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.952 <sup>a</sup>	.906	.875	46649.673	2.482

a. Predictors: (Constant), Investasi, Gini Ratio, Belanja Pemerintah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Olah SPSS 21, 2019

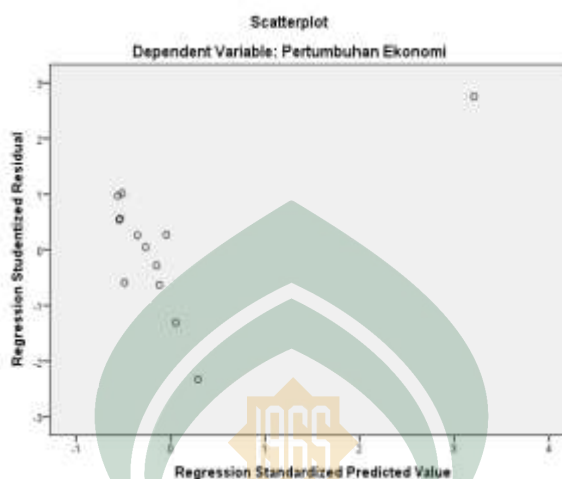
Berdasarkan tabel output “Model Summary” diatas diketahui nilai durbin Watson adalah sebesar 2,482 pada taraf signifikan 5% dengan rumus  $(K;N)$ , Adapun jumlah variable independen dalam penelitian ini adalah 3 atau  $K = 3$  sementara jumlah sampel atau  $N = 13$ . Maka di peroleh nilai tabel durbin Watson dL sebesar 0,714 dan dU 1,815 Karena nilai Durbin Watson sebesar 2,482 lebih besar dari nilai dL dan dU maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji durbin watson, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

#### **d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika varian berbeda disebut

heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian penelitian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Uji Heteroskedastisitas**



*Sumber: Hasil Olah SPSS 21, 2019*

Berdasarkan output scatter plot diatas diketahui titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar titik 0, titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, berdasarkan pengambilan keputusan uji scatterplot maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam data penelitian ini.

## **2. Analisis Regresi Linear Berganda**

Di dalam penelitian ini, menggunakan analisis data regresi linear berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik. Analisis regresi linear berganda digunakan karena di dalam penelitian ini mencakup empat variabel (termasuk variabel Y). Dimana di dalam analisis regresi linear berganda variabel (Y) merupakan variabel terikat yang bergantung pada dua atau lebih variabel bebas (X). Hasil dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel hasil analisis regresi linear berganda yang merupakan output dari SPSS 21.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Analisis Regresi**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	518.038	456.523		11.359	.000
Gini Ratio	12.127	1.519	-.935	7.984	.000
Belanja Pemerintah	10.020	.000	-.015	1.115	.011
Investasi	14.400	.000	-.106	2.955	.005

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Olah SPSS 21, 2019

$$Y = 518.038 + 12,127 + 10,020 + 14,400 + e$$

- a. Nilai Konstanta (a). Nilai konstanta sebesar 518,038 yang berarti jika gini ratio (X1), belanja pemerintah (X2) dan investasi (X3) nilainya konstan atau 0 maka nilai pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 518,038.
- b. Gini ratio (X1). Output koefisien regresi linear berganda untuk variable gini ratio sebesar 12,127 artinya jika nilai gini ratio meningkat 1% maka nilai variabel pertumbuhan ekonomi (Y) juga akan meningkat sebesar 12,127. Arah hubungan antara gini ratio dan pertumbuhan ekonomi searah (+), dimana meningkatnya nilai gini ratio akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi.
- c. Belanja pemerintah (X2). Output koefisien regresi linear berganda untuk variable belanja pemerintah sebesar 10,020 artinya jika nilai belanja pemerintah meningkat 1% maka nilai variabel pertumbuhan ekonomi (Y) juga akan meningkat sebesar 10,020 rupiah. Arah hubungan antara belanja

pemerintah dan pertumbuhan ekonomi searah (+), dimana meningkatnya nilai belanja pemerintah akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi.

- d. Investasi (X3). Output koefisien regresi linear berganda untuk variable investasi sebesar 14,400 artinya jika nilai investasi meningkat 1% maka nilai variabel pertumbuhan ekonomi (Y) juga akan meningkat sebesar 14,400 rupiah. Arah hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi searah (+), dimana meningkatnya nilai investasi akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi.

### 3. Penguji Hipotesis

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk mengetahui kontribusi koefisien regresi antara variabel bebas dengan variabel terikat maka digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1 maka pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat adalah kuat, apabila koefisien adalah 0 maka tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.9**  
**Tabel Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.952 <sup>a</sup>	.906	.875	46649.673

a. Predictors: (Constant), Investasi, Gini Ratio, Belanja Pemerintah

Sumber: Hasil Olah SPSS 21, 2019

Hasil output diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang dituntukan dengan R *square* sebesar 0,906 (pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu  $0,952 \times 0,952 = 0,906$ ) atau sama dengan sebesar 90,6% dari nilai ini



menunjukkan bahwa hubungan variabel independen gini ratio (X1), belanja pemerintah (X2) dan investasi (X3) dengan variabel dependen pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 90,6%. Sedangkan sisanya ( $100\% - 90,6\% = 9,4\%$ ) dipengaruhi oleh variabel luar.

#### b. Uji F Simultan

Untuk mengetahui adanya pengaruh gini ratio (X1), belanja pemerintah (X2), investasi (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap secara bersama-sama, maka digunakan alat analisis yaitu uji F simultan. Kriteria pengambilan di dalam uji F adalah apabila nilai probabilitas  $F_{hitung} \geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan kata lain bahwa secara bersama-sama variabel gini ratio (X1), belanja pemerintah (X2), investasi (X3) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Sidrap. Sebaliknya apabila nilai probabilitas  $F_{hitung} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel gini ratio (X1), belanja pemerintah (X2), investasi (X3) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Sidrap.

**Tabel 4.10**  
**Uji F Simultan**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	188911955297.910	3	62970651765.970	28.936	.000 <sup>b</sup>
Residual	19585727779.014	9	2176191975.446		
Total	208497683076.923	12			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Investasi, Gini Ratio, Belanja Pemerintah

Sumber: Hasil Olah SPSS 21, 2019

Berdasarkan output spss tabel ANOVA diatas diperoleh:

1. Diketahui nilai sig. Sebesar 0,000. Berdasarkan pengambilan keputusan dilihat dari nilai sig. Jika nilai sig < 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh simultan atau memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari tabel diatas diperoleh nilai sig. Sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang artinya variabel gini ratio (X1), belanja pemerintah (X2) dan investasi (X3) berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.
2. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel diperoleh nilai F sebesar 28,936. Sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji F simultan jika nilai F hitung > F tabel maka variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui nilai F tabel maka menggunakan rumus  $(K ; n-K)$ ,  $K=3$ ,  $n=13$  maka  $K ; n-K = 3 ; 13 - 3: (10)$  diperoleh nilai F tabel sebesar 3,710 Karena nilai F hitung sebesar  $28,936 > F \text{ tabel } 3,710$  maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan F tabel artinya variabel gini ratio (X1), belanja pemerintah (X2) dan investasi berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di kabupaten sidrap.

#### c. Uji Parsial t

Uji t di dalam analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh secara parsial diantara variabel gini ratio (X1), belanja pemerintah (X2), investasi (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Sidrap. Adapun kriteria pengujian untuk uji t yaitu apabila nilai probabilitas thitung < 0.05 maka

H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti ada pengaruh signifikan antar variabel bebas terhadap variabel terikat dan apabila nilai probabilitas thitung  $> 0.05$  maka H0 diterima dan Ha ditolak sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antar masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.11**  
**Uji Parsial (t)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	518.038	456.523		11.359	.000
Gini Ratio	12.127	1.519	-.935	7.984	.000
1 Belanja Pemerintah	10.020	.000	-.015	1.115	.011
Investasi	14.400	.000	-.106	2.955	.005

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Olah SPSS 21, 2019

Tabel Output diatas menunjukkan pengaruh secara parsial sebagai berikut:

1. Pengaruh Gini Ratio Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidrap.

Nilai variabel gini ratio (X1) pada tabel koefisien sebesar  $0,000 < 0,05$ . sesuai pengambilan keputusan dalam uji hipotesis parsial t jika nilai sig.  $< 0,05$  berdasarkan pengambilan keputusan uji hipotesis parsial t maka Ha diterima dan H0 di tolak yang artinya gini ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten sidrap

2. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidrap.

Nilai variabel belanja pemerintah (X2) sebesar  $0,011 < 0,05$  sesuai pengambilan keputusan dalam uji hipotesis parsial t jika nilai sig.  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak yang artinya belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten sidrap.

### 3. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidrap.

Nilai variabel investasi (X3) sebesar  $0,005 < 0,05$  sesuai pengambilan keputusan dalam uji hipotesis parsial t jika nilai sig.  $< 0,05$ . Berdasarkan pengambilan keputusan uji hipotesis parsial t maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak yang artinya investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten sidrap.

#### ***D. Pembahasan***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel gini ratio, belanja pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian dapat dilihat dari uji F simultan dan Uji Parsial (t) beserta koefisien regresi dari masing-masing variabel.

Hasil regresi secara parsial menggunakan pengujian uji t dari variabel bebas yaitu variabel gini ratio pada analisis data menunjukkan ada pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu juga dengan variabel belanja pemerintah dan variabel investasi menunjukkan hasil yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari pengujian uji t dan nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas tersebut.

## 1. Pengaruh Gini Ratio Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidrap

Berdasarkan output analisis uji hipotesis parsial t diperoleh nilai variabel gini ratio pada tabel koefisien sebesar  $0,000 < 0,05$  berdasarkan pengambilan keputusan uji hipotesis parsial t maka  $H_a$  diterima atau hipotesis pertama diterima yang artinya gini ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap. Hal ini berarti, apabila ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sidrap meningkat sebesar 1 % maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap akan naik sebesar 12,127% persen dan sebaliknya apabila ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sidrap menurun sebesar 1% maka laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap turun sebesar 12,127%, sesuai dengan asumsi *Ceteris Paribus*.

Penelitian ini menunjukkan adanya *trade-off* diantara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sidrap. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznets (1955) dan Kaldor (1960), dimana mereka menyatakan bahwa ketidakmerataan pendapatan merupakan kondisi yang diperlukan bagi tercapainya suatu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti, semakin tidak meratanya ketimpangan pendapatan suatu negara atau daerah maka semakin tinggi pula laju pertumbuhan perekonomiannya, hal ini dikarenakan orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang miskin, sehingga akan meningkatkan *aggregate saving rate* yang diikuti oleh peningkatan investasi sebagai suatu modal pembangunan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Di dalam Penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Retnosari (2006) dan Yamamura dalam Ilham (2010), Akai dan Sakata (2005) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian mengenai pengaruh gini ratio terhadap pertumbuhan ekonomi juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahluwalia (1976), Willianson (1965), mengenai ketimpangan dengan mengadaptasi gagasan Kuznet (1955) di Amerika Serikat, Kanada, Kolombia, dan Spanyol. Adapun temuan yang didapatkan adalah ketimpangan hanya berlangsung sementara yaitu pada tahap awal pembangunan akan tetapi seiring dengan matangnya pertumbuhan ekonomi konvergensi akan tercipta atau dengan kata lain terjadi pengurangan ketimpangan.

## **2. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidrap**

Berdasarkan output analisis uji hipotesis parsial t diperoleh nilai variabel belanja pemerintah sebesar  $0,011 < 0,05$  maka  $H_a$  diterima atau hipotesis kedua diterima yang artinya belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten sidrap. Hal ini berarti, apabila belanja pemerintah di Kabupaten Sidrap meningkat sebesar 1% maka belanja pemerintah juga akan meningkat sebesar 10,020%, begitupun sebaliknya apabila belanja pemerintah turun sebesar 1%, maka belanja pemerintah juga akan turun 10,020%.

Di dalam konsep ekonomi makro, pengeluaran pemerintah akan meningkatkan perekonomian nasional. Pengeluaran pemerintah ini mendorong



perekonomian, dengan asumsi bawa pengeluaran pemerintah tersebut digunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan perekonomian atau sebagai suatu yang memberikan dorongan bagi perkembangan perekonomian. Jadi apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merry, Ahmad (2015) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kegiatan pembangunan suatu daerah, sehingga hal ini dapat memberikan efek yang positif terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian. Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes dalam Dumaury (1996), dimana belanja pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkat belanja pemerintah maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat.

Penelitian mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Feltenstein dan Iwata (2005), Lin dan Liu (2000), Garba dan Abdullahi (2013), Bataineh (2012) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, akumulasi modal dan sektor swasta yang merupakan kunci di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **3. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidrap**

Berdasarkan output analisis uji hipotesis parsial t diperoleh nilai variabel investasi sebesar  $0,005 < 0,05$  Berdasarkan pengambilan keputusan uji hipotesis parsial t maka  $H_a$  diterima atau hipotesis ketiga diterima yang artinya investasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten sidrap. Hal ini berarti, jika investasi di Kabupaten Sidrap naik sebesar 1% maka variabel investasi perkembangan investasi juga naik sebesar 14,400%. Sebaliknya apabila investasi di Kabupaten Sidrap turun 1% maka perkembangan investasi juga akan turun sebesar 14,400%.

Dengan demikian hasil penelitian ini juga mendukung temuan Puspitasari (2018), Tri Handayani (2011), Adrian Sutawijaya (2010), Alexiou (2009), Kim (1997), Phetsavong dan Ichihasi (2012) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi yang tinggi tersebut dapat menambah faktor-faktor produksi maka output yang diperoleh juga akan semakin meningkat. Jadi dapat dikatakan, semakin tinggi suatu investasi maka pendapatan yang diperoleh juga akan semakin meningkat. Hal ini tentunya menjadi suatu tantangan bagi pihak pemerintah di Kabupaten Sidrap, jika pertumbuhan ekonomi ingin lebih baik maka investasi perlu di tingkatkan dan dioptimalkan.

Ditambahkan pula oleh Harrod-Domar dalam Sadono (2007), menyatakan bahwa modal merupakan suatu peranan kunci di dalam proses pertumbuhan ekonomi, terkhusus mengenai waktu ganda yang dimiliki investasi. Pertama investasi menciptakan pendapatan dan kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal, dikarenakan selama investasi netto tetap berlangsung pendapatan dan output akan senantiasa membesar. Di dalam penelitian ini investasi mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang memiliki kontribusi cukup besar di dalam menyumbang pertumbuhan suatu perekonomian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian beserta hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel gini ratio berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.
2. Variabel belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.
3. Variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap.

#### ***B. Saran***

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sidrap tetap perlu ditekan, hal ini dimaksudkan agar pendapatan merata disetiap kalangan masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sidrap selaku pembuat kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Pemerintah Kabupaten Sidrap dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan tiga cara yaitu melalui pajak, pengeluaran pemerintah dan regulasi. Cara selanjutnya yang dapat dilakukan adalah

merealokasikan belanja daerah pada sektor-sektor atau kegiatan yang dapat memampukan kaum miskin. Upaya untuk mengatasi ketimpangan dapat sejalan dengan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh kalangan masyarakat.

2. Dari hasil yang diperoleh yaitu belanja pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap, maka pemerintah di Kabupaten Sidrap harus berupaya meningkatkan jumlah pengeluaran atau belanja pemerintah sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tentunya disertai dengan peningkatan pendapatan anggaran daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Sidrap diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi dan kebijakan yang dapat mendorong masuknya investasi asing maupun dalam negeri yang lebih besar lagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Strategi yang dapat dilakukan misalnya, pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial bagi masyarakat, serta pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutawijaya. “*Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006*”. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol.6, No.1.2010.
- Akai, Nobuo dan Masayo Sakata. *Fiscal Desentralization, Commitment, and Regional Inequality: Evidence from States-Level Cross-Sectional Data For The United States*. CIRJE-F-315. 2005.
- Alexiou, C. *Government Spending and Economic Growth; Economic Advance from the South Eastern Europe*. Journal of Economic Social Research, 11: 1-16. 2009,
- Ahluwalia, M, “ *Income Distribution and Development* ” Journal of Economic Review, 66, 5, 128-342. 1976.
- Badan Pusat Statistik., Provinsi Sulawesi Selatan, 2019.
- Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi Kabupaten Sidrap, 2019.
- Bataineh, Ibrahim Mohamed. *The Impact of Government Expenditure on Economic Growth In Jordan*. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, Vol 4, No 6 October. 2012.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Cetakan Kelima, Jakarta, Erlangga, 1996)
- Utami Diyah. “*Analisis Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 1975-2004*”. 2007.
- J.Daniel, dan Mitchei. *The Impact of Government Spending on Economic*. 2005.
- Felstenstein, A. and S. Iwata. *Decentralization and Macroeconomic Performance in China: Regional Autonomy Has its Costs*. Journal of Development Economics. 76:481-501. 2005.
- Giavazzi, F., and M. Pegano. “*Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy Changes: International Evidence and the Swedish Experience*.” Swedish Economic Policy Review, 31, 1996, 67-103
- Garba, T., dan Abdullahi, Sabi’u. *Ya’u Impact of Government Expenditure on Economic Growth: An Application of Cointegration and Granger Causality Tests on Nigeria*. Journal of Economic and Social Research, 15(1), 1. . 2013.
- Handayani, Tri. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1999-2008*”. Yogyakarta 2011.

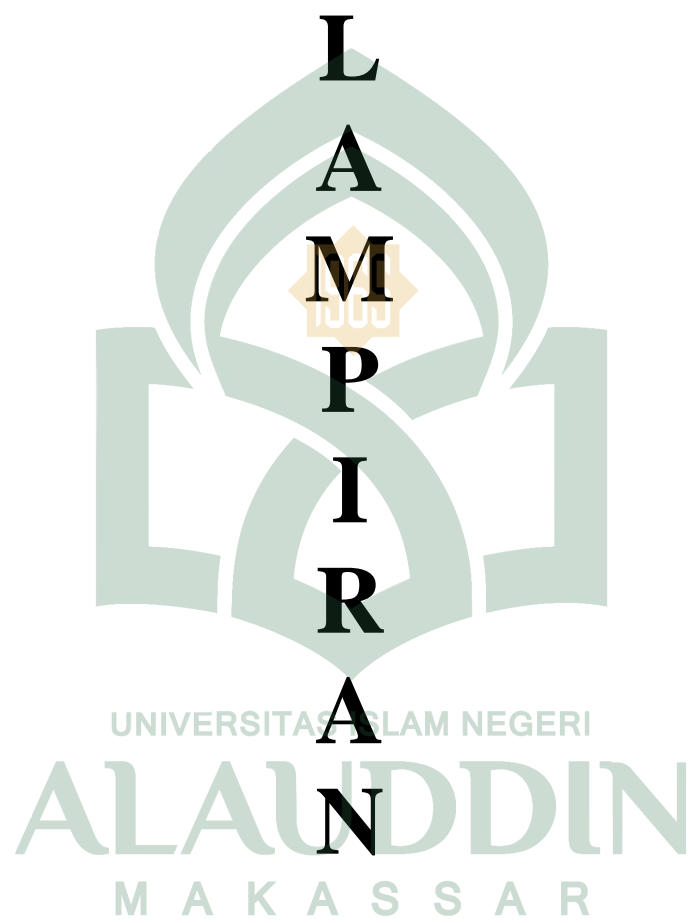


- Ilham Irsyad Risyadi *Pengaruh Pembiayaan Syariah, Belanja Pemerintah, Dan Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2012-2016*. 2018.
- Jhingan, M, L.. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa. 2003.
- J Sodik, D Nuryadin..”Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Provinsi Di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10, 2 (2005).
- Kuznets, S. *Economic Growth and Income In-equality*, American Economic Review. 1955.
- Kuncoro, Mudrajat. 2006. “*Ekonomi Pembangunan*”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kim, Sung Tai. “*The Role of Local Public Sectors in Regional Growth in Korea*” *Asian Economic Journal*, Vol 11 No. 21, 155-168. 1977.
- Lucas, R.E. *On the mechanism of economic development*, *Journal of Monetary Economics*, Vol. 22, pp.3-42. 1988.
- Lin, J.Y. and Z. Liu. *Fiscal Desentralization and Economic Growth in China*. *Economic Development and Cultural Change*. 49(1):1-21. 2000.
- L Agussalim. “*Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*”. Vol 20, No 1, Th. 2016.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Quran*. Jakarta: Lantera Hati. 2002.
- Mangkoesebroto, Guritno. “*Ekonomi Publik Edisi ketiga*”. Yogyakarta : BPFE. 1997.
- Mangkoesebroto, Guritno, “*Ekonomi Publik Edisi 3*”. Yogyakarta : BPFE, Yogyakarta, 2008.
- Mankiw, N Gregory , *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta; Erlangga, 2003.
- Marx, Karl dan Engels, Friedrich. *The Communist Manifesto*. New York: A Washington Square Press Publication. 1964.
- Nopirin. “*Ekonomi Moneter*”, Yogyakarta, BPFE. 1988.
- Piketty T. *Capital in the 21st Century*. *American Economic Review*, 2015-aeaweb.org. 2014.
- Puspitasari Windy Astuti. “*Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi pada 33 provinsi di Indonesia)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol.6, NO 2. 2018



- Putong, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Phetsavong, Kongphet & Ichihashi, Masaru. *The Impact of Public and Private Investment on Economic Growth: Evidence from Developing Asian Countries*. IDEC Discussion Paper Hiroshima University, 1-21. 2012.
- Romer, P.M. *Increasing return and long run growth*, Jurnal of Political Economy, vol.95, pp. 1002-1037. 1986.
- \_\_\_\_\_, Endogenous technological change, Jurnal of Political Economy, Vol. 98, no.5, pt. 2. 1990.
- Schultz, Theodore, W. "Investment in Human Capital". The American Economic Review, No. 51. 1961.
- Sukirno, Sadono. Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi 3. Jakarta Raja Grafindo Persada (Rajawali Perss). 2011.
- Sukirno S. Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan. Cetakan Ketiga. Jakarta Penerbit Kencana. 2006.
- Sabar Wardihan, "*Determinan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang*", Hasil penelitian ekonomi perencanaan pembangunan. Publikasi Online. PPS Unhas. 2012.
- Sukirno, Sadono. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2007.
- Todaro, M. P & Smith, S.C. Economic development, Addison Wesley, Boston. 2006.
- Williansons, J.G. *Regional and Equality and The Process of National Development: A Description Pattern*. Economic Development and Cultural Change, Vol. 13, No. 4, Pp. 3-45. 1965.





**LAMPIRAN I****Data Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, Belanja Pemerintah Dan Investasi Kabupaten Sidrap Tahun 2006-2018**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Gini Ratio	Belanja Pemerintah	Investasi
2006	6,96	0,347	331,194,069,864.00	712,044.32
2007	5,46	0,385	404,471,387,820.00	791,825.90
2008	8,23	0,351	508,130,280,222.45	984,915.17
2009	6,65	0,390	523,645,591,040.11	1,110,638.44
2010	4,45	0,304	492,946,189,824.35	1,607,738.47
2011	11,82	0,338	595,591,702,664.00	1,912,624.26
2012	8,37	0,391	566,462,997,278.66	2,284,616.33
2013	6,93	0,388	738,651,821,492.00	2,763,197.84
2014	7,87	0,369	812,668,038,096.00	3,089,131.36
2015	8,03	0,359	1,044,498,205,909.92	3,492,443.80
2016	8,81	0,384	1,200,899,695,872.00	4,023,356.26
2017	7,11	0,325	1,298,748,117,451.00	4,530,141.11
2018	5,02	0,340	1,185,592,943,580.00	5,016,222.98

Sumber: BPS Kabupaten Sidrap, 2019

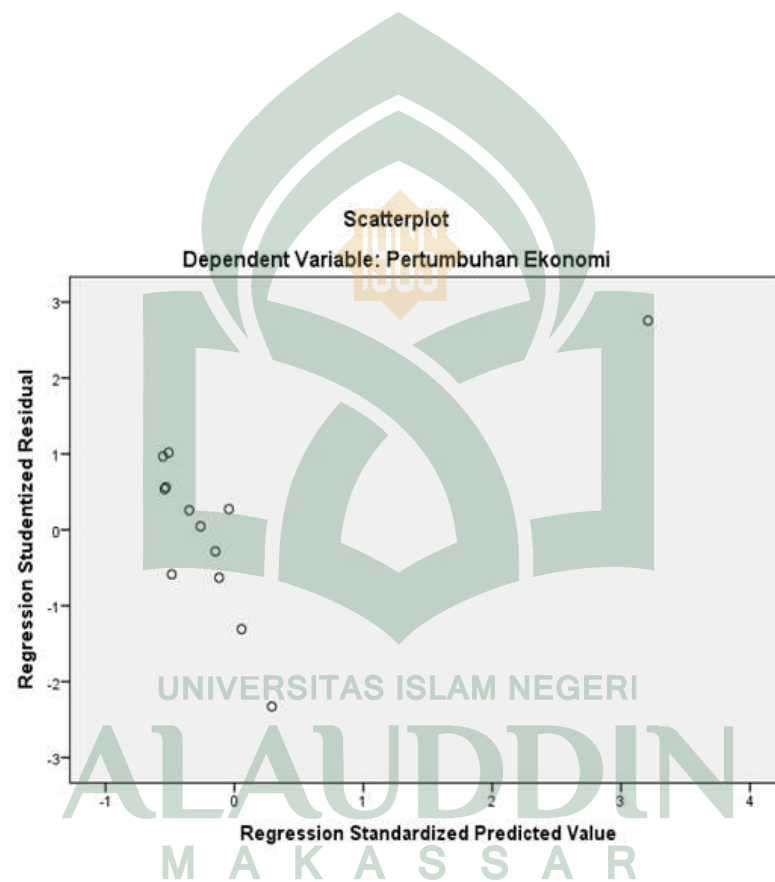
## LAMPIRAN II

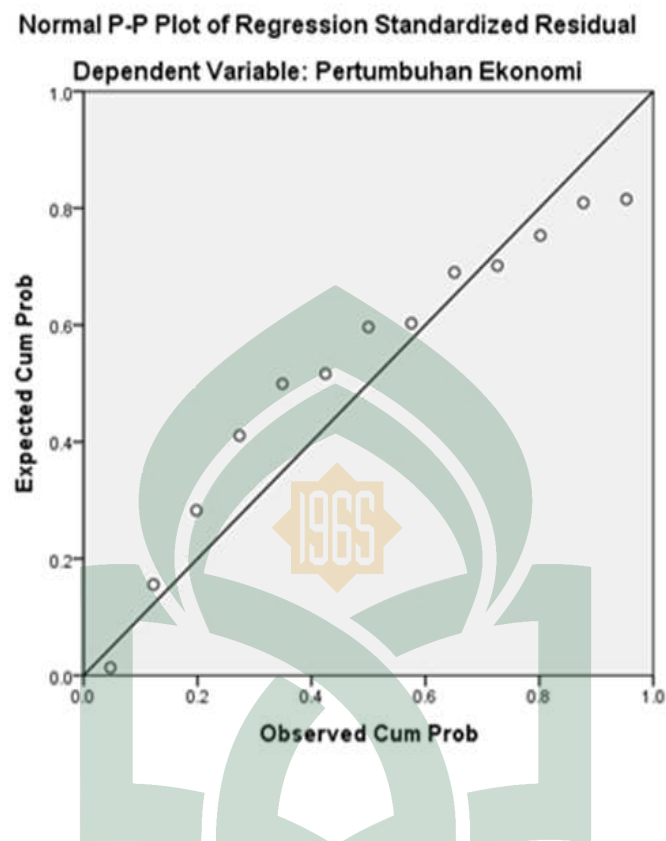
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.952 <sup>a</sup>	.906	.875	46649.673	2.482

a. Predictors: (Constant), Investasi, Gini Ratio, Belanja Pemerintah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi





**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.952 <sup>a</sup>	.906	.875	46649.673

a. Predictors: (Constant), Investasi, Gini Ratio, Belanja Pemerintah

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	188911955297.910	3	62970651765.970	28.936	.000 <sup>b</sup>
Residual	19585727779.014	9	2176191975.446		
Total	208497683076.923	12			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Investasi, Gini Ratio, Belanja Pemerintah


**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	518.038	456.523		11.359	.000
1 Gini Ratio	12.127	1.519	-.935	7.984	.000
Belanja Pemerintah	10.020	.000	-.015	1.115	.011
Investasi	14.400	.000	-.106	2.955	.005

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi





  
**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**NOMOR : 1181 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**A.n.Nurqalbi, NIM : 90300115140**  
**JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Nurqalbi, NIM: 90300115140** tertanggal 16 Juli 2019 untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul **"Pengaruh Gini Ratio, Belanja Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidrap"**.

**Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal penelitian, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar proposal penelitian dan penyusunan skripsi  
 b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.  
 c. Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
 4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Proposal penelitian dan penyusunan skripsi, Jurusan **ILMU EKONOMI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
 

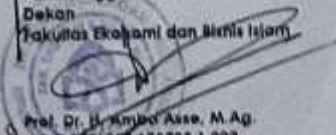
<b>Ketua</b>	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
<b>Sekretaris</b>	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
<b>Pembimbing</b>	: Dr. Syaharuddin, M.Si.
<b>Pembimbing II</b>	: Andi Faisal Anwar, SE., M.Si.
<b>Penguji I</b>	: Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
<b>Penguji II</b>	: Dr. Alim Syahrill, M.Si.
<b>Pelaksana</b>	: Nurmiah Muli, S.I.P., MM.

2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi

3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
 Pada tanggal : 23 Juli 2019  
 Dekan  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
 Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
 NIP. 195210421987031002

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa  
 2. Para Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 3. Arsip



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2407 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.Nurqalbi, NIM : 90300115148  
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Mem baca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Nurqalbi, NIM: 90300115148** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Hegeri Alauddin menjadi Universitas Islam Hegeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **ILMU EKONOMI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

**Ketua** : Prof. Dr. H. Ambo Aase, M.Ag.  
**Sekretaris** : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.  
**Pembimbing** : Dr. Syaharuddin, M.Si.  
**Pembimbing II** : Andi Faisal Anwar, SE., M.Si.  
**Penguji I** : Dr. H. Abd. Wahab, SE, M.Si.  
**Penguji II** : Dr. Alim Syahrati, M.Si.  
**Pelaksana** : Della Fadhlaturrisa, M. Ak.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi.
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- Kedua** : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 05 November 2019  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Abubakar Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19881130 199303 1 003

Tersusun : 1. Rektu UIN Alauddin Makassar & Samata-Gowa  
2. Para Dosen & Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
3. Arif

PEMBAKASA	KASUBAG AKADEMI



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2674 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH  
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat permohonan : Nurqalbi  
NIM : 90300115148  
Tanggal : 08 November 2019  
Mahasiswa Jurusan : ILMU EKONOMI  
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul: **"Pengaruh Gini Ratio, Belanja Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidrap"**
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah  
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).  
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 8 Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag.  
Sekertaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.  
Penguji I : Dr. H. Abd. Wahab, SE, M.Si.  
Penguji II : Dr. Alim Syahriati, M.Si.  
Pembimbing I : Dr. Syaharuddin, M.Si.  
Pembimbing II : Andi Faisal Anwar, SE., M.Si.  
Pelaksana : Della Fadhlaturrisa, M. Ak.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 12 November 2019  
Kuas Dekan  
Nomor : 6111/EB.1/Kp.07/11/2019  
Tanggal : 11 November 2019

Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.  
NIP. 19730525 200801 1 017

PEMBAKARSA (FAKULTAS)	KASUBAG AKADEMIK (NURMAH MUIN, S.P., MM)



1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 1 2 5 5 6

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : Z2217/S.01/PTSP/2019

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Sidrap

di-

**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 3112/EB.I/PP.00.0/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

**Nama : NURQALBI**  
**Nomor Pokok : 90300115148**  
**Program Studi : Ilmu Ekonomi**  
**Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)**  
**Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PENGARUH GINI RATIO, BELANJA PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SIDRAP "**


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 Agustus s/d 28 September 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Diberitkkan di Makassar  
 Pada tanggal : 27 Agustus 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002


Terbaca Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pustigra.



SDRP PTSP 28-08-2019

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://smap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90222





**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-867/BPS/731400/01/08/2019

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa, yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : NURQALBI  
Asal Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Alamat : Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36, Samata, Gowa

Benar, pernah meminta dan melakukan konsultasi data terkait **Pengaruh Gini Ratio, Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidrap** di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang pada Agustus 2019.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan seperlunya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkajene, 30 Agustus 2019

An. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Ka. Sub Bagian Tata Usaha,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALA UDDIN**  
MAKASSAR  
ABD RAHIM MUSTAFA, SE.M.Si  
NIP. 197109071994011001

Jl. Jend. Sudirman No. 125, Pangkajene, 91611, Sidenreng Rappang  
Telp. : (0421) 91427 Fax. : (0421) 90449  
Email: [bps7314@bps.go.id](mailto:bps7314@bps.go.id) [website/sidrapkab.bps.go.id](http://website/sidrapkab.bps.go.id)



### RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **NurQalbi** atau biasa di panggil Qalbi.

Penulis di lahirkan di Maroangin 12 Mei 1997, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda

**Jumain** dan Ibunda **Hj Marwah AS S. Pd. i** Pendidikan

penulis di mulai tahun 2004 di SDN 1 Rappang dan menyelesaikannya pada tahun 2009, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan setelah menengah pertama di MTs YMPI Rappang. Dan di selesaikan pada tahun 2012, kemudian di lanjutkan di MA YMPI Rappang dan menyelesaikannya pada tahun 2015, pada awal September 2015 telah tercatat sebagai salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Aalauddin Makasar tepatnya di Samata gowa dengan jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kini dengan penuh perjuangan, kerja keras dan penuh proses pembelajaran yang tiada henti akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Jurusan Ilmu Ekonomi sebagai calon pemikir ekonom di masa yang akan datang.

